

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia berperan krusial sebagai aset utama dan elemen penunjang dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Keberhasilan tersebut dapat ditentukan dari kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki masyarakat. Selain itu, kualitas sumber daya manusia dapat dijadikan tolak ukur kinerja yang dapat dilihat dari kemajuan dan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah (Feri et al., 2024). Berdasarkan data elaborasi Worldometer terhadap data PBB terbaru, tercatat jumlah penduduk Indonesia pada Rabu, 19 Maret 2025 adalah 285.078.657 jiwa . Populasi Indonesia 2025 diperkirakan mencapai 285.721.236 jiwa pada pertengahan tahun (U.N. Dept. of Economic and Social Affairs, 2025).

Jumlah penduduk Indonesia setara dengan 3,47% dari total populasi dunia. Indonesia menempati peringkat ke-4 pada deretan negara (dan jumlah penduduk) berdasarkan jumlah penduduk. Kepadatan penduduk di Indonesia adalah 158 per km² dengan luas wilayah 1.811.570 km². 59,6% dari populasi Indonesia adalah penduduk perkotaan (170.361.295 jiwa pada tahun 2025). Beberapa tahun mendatang, Indonesia akan mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah penduduk usia produktif, yang dikenal sebagai bonus demografi, khususnya pada periode 2030-2040. Bonus demografi merupakan sebuah fenomena di mana pada rentang waktu tersebut, mayoritas penduduk Indonesia berada dalam kategori usia

produktif (usia 15-64 tahun) dibandingkan usia non produktif (Balitbang Kemenhan RI, 2024)..

Permasalahan kependudukan sekarang ini menjadi rintangan kompleks bagi Indonesia, yang akan menghadapi bonus demografi dalam skala luas, sehingga berpotensi memengaruhi sosial dan ekonomi. Salah satunya mengakibatkan angka ketergantungan penduduk, yakni perbandingan jumlah penduduk produktif yang menopang penduduk nonproduktif akan sangat kecil (Charimah & Setiawati, 2024). Situasi ini membutuhkan perhatian khusus serta pertolongan dari seluruh pemangku kepentingan guna menyokong pemerintah dalam merancang kebijakan dan program yang berpengaruh terhadap permasalahan kemakmuran rakyat. Bonus demografi tersebut apabila dapat dimanfaatkan oleh pemerintah akan menjadi modal dasar bagi pembangunan. Namun apabila tidak dapat memanfaatkan bonus demografi akan menjadi beban atau permasalahan bagi negara Indonesia, salah satunya pengangguran (Anggaresa & Suryana, 2023).

Langkah pemerintah pusat dalam mengatasi persoalan pengangguran bersandarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan terkait upaya penciptaan atau penyediaan lapangan kerja berdasarkan perjanjian kerja yang mencakup unsur upah, pekerjaan dan tunjangan, tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja. Kebijakan ini difokuskan guna memperluas peluang kerja yang produktif dan berkesinambungan sesuai dengan potensi SDA dan SDM, kelembagaan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi yang sesuai.

Permasalahan pengangguran menjadi hal yang tak terhindarkan mengingat hal ini merupakan masalah jangka panjang yang dihadapi oleh banyak kota di negara berkembang, termasuk Indonesia. Sembiring & Sasongko (2019) mengemukakan bahwa pengangguran berkontribusi pada penurunan permintaan agregat. Ketika permintaan agregat mengalami penurunan, produksi juga akan terpengaruh, yang pada gilirannya akan mengurangi permintaan di pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran suatu negara dapat menentukan keadaan ekonomi negara tersebut berada pada kondisi berkembang atau stagnan, bahkan sampai mengalami kemunduran. Tingkat pengangguran juga dapat menunjukkan ketidaksamaan dalam distribusi pendapatan masyarakat negara tersebut (Chollisni et al., 2022). Mengurangi tingkat pengangguran dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan per kapita (Putri & Shidiqie, 2023).

Pengangguran terbuka merujuk pada kondisi di mana individu yang tergolong dalam angkatan kerja sedang aktif mencari pekerjaan, baik mereka yang sedang mencari pekerjaan untuk pertama kalinya maupun yang sebelumnya telah memiliki pengalaman kerja, tetapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan. Definisi tersebut menekankan bahwa pengangguran terbuka mencakup mereka yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya (Prayitno & Kusumawardani, 2022). Fenomena pengangguran terbuka muncul sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan jumlah peluang kerja yang tersedia (lowongan pekerjaan). Sebagai konsekuensinya, sebagian angkatan kerja tidak mampu memperoleh pekerjaan dan harus

menganggur sementara waktu, atau hingga muncul peluang kerja baru yang cocok dengan kemampuan serta kualifikasi mereka (Marini & Putri, 2020).

Seperti halnya dengan yang terjadi di Kota Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, memiliki tingkat pengangguran cukup tinggi meskipun menjadi pusat ekonomi, perdagangan, dan industri di Jawa Timur. Beberapa penyebab tingginya tingkat pengangguran di Kota Surabaya di antaranya: *Pertama*, urbanisasi yang tinggi. Sebagai pusat ekonomi, Kota Surabaya menarik banyak penduduk dari daerah lain untuk mencari pekerjaan. Namun, tidak semua orang yang mencari pekerjaan mempunyai keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri di kota ini, sehingga menyebabkan meningkatnya angka pengangguran (Muttaqin, 2020).

Kedua, ketidakseimbangan antara keterampilan dan kebutuhan industri. Banyak alumni perguruan tinggi atau sekolah menengah belum mempunyai keterampilan yang cocok dengan tuntutan pasar kerja. Perusahaan cenderung mencari tenaga kerja dengan keterampilan khusus yang tidak selalu dimiliki oleh pencari kerja (Purmadani & Purnamasari, 2024). *Ketiga*, dampak transformasi ekonomi. Perubahan ekonomi akibat digitalisasi dan otomasi menyebabkan beberapa sektor pekerjaan tradisional mengalami penurunan karena mulai tergantikan oleh teknologi, yang berdampak pada berkurangnya lapangan kerja bagi tenaga kerja dengan keterampilan rendah (Oktafianto et al., 2019).

Keempat, tingkat persaingan yang tinggi. Sebagai kota metropolitan, banyak tenaga kerja dari luar daerah datang ke kota ini dengan harapan mendapatkan pekerjaan, sehingga semakin memperketat kompetisi dalam dunia kerja. *Kelima*,

kemiskinan dan keterbatasan pendidikan. Masih terdapat kelompok masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan pelatihan kerja, yang menyebabkan mereka sulit mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang layak (Digdowiseso et al., 2023).

Menurut data yang diperoleh oleh peneliti dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Surabaya masih tergolong tinggi. Menurut BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran dibandingkan dengan total angkatan kerja. TPT berfungsi sebagai indikator untuk menilai proporsi tenaga kerja yang belum terserap di pasar kerja. Berikut adalah data TPT Kabupaten/Kota di Jawa Timur:

Tabel 1.1. TPT menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2022	2023	2024
Kabupaten Pacitan	3,65	1,83	1,56
Kabupaten Ponorogo	5,51	4,66	4,19
Kabupaten Trenggalek	5,37	4,52	3,9
Kabupaten Tulungagung	6,65	5,65	4,12
Kabupaten Blitar	5,45	4,91	4,77
Kabupaten Kediri	6,83	5,79	5,1
Kabupaten Malang	6,57	5,7	5,13
Kabupaten Lumajang	4,97	3,67	3,28
Kabupaten Jember	4,06	4,01	3,23
Kabupaten Banyuwangi	5,26	4,75	4,03
Kabupaten Bondowoso	4,32	4,15	3,63
Kabupaten Situbondo	3,38	3,27	3,15
Kabupaten Probolinggo	3,25	3,24	3
Kabupaten Pasuruan	5,91	5,48	5,02
Kabupaten Sidoarjo	8,8	8,05	6,49
Kabupaten Mojokerto	4,83	4,67	3,87
Kabupaten Jombang	5,47	4,66	3,75
Kabupaten Nganjuk	4,74	4,68	3,87
Kabupaten Madiun	5,84	5,14	4,34
Kabupaten Magetan	4,33	4,16	3,28
Kabupaten Ngawi	2,48	2,41	2,4
Kabupaten Bojonegoro	4,69	4,63	4,42
Kabupaten Tuban	4,54	4,4	4,28
Kabupaten Lamongan	6,05	5,46	4,34

Kabupaten Gresik	7,84	6,82	6,45
Kabupaten Bangkalan	8,05	6,18	5,35
Kabupaten Sampang	3,11	2,72	2,5
Kabupaten Pamekasan	1,4	1,74	1,64
Kabupaten Sumenep	1,36	1,71	1,69
Kota Kediri	4,38	4,06	3,91
Kota Blitar	5,39	5,24	5,11
Kota Malang	7,66	6,8	6,1
Kota Probolinggo	4,57	4,53	4,44
Kota Pasuruan	6,18	5,64	4,63
Kota Mojokerto	5,05	4,73	3,76
Kota Madiun	6,39	5,85	4,3
Kota Surabaya	7,62	6,76	4,91
Kota Batu	8,43	4,52	3,63
Jawa Timur	5,49	4,88	4,19

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (2024)

Berdasarkan data di atas, selama periode 3 tahun terakhir TPT Kota Surabaya menunjukkan tren yang menurun. Realisasi TPT pada tahun 2022 tercatat sebesar 7,62 persen, kemudian di tahun selanjutnya 2023 mengalami penurunan menjadi 6,76 persen. Adapun di tahun 2024 juga terjadi penurunan yang cukup besar, mencapai angka 4,91 persen. Situasi ini menunjukkan keberhasilan Kota Surabaya dalam mengurangi pengangguran di Kota Surabaya. Akan tetapi, tingginya persentase angkatan kerja yang masih menganggur mengindikasikan bahwa TPT berada pada level yang tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa masih banyak angkatan kerja yang tidak terserap di pasar kerja.

Dalam mengatasi permasalahan pengangguran, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan inisiatif pada akhir tahun 2021 dengan meluncurkan program Padat Karya guna mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan. Program ini melibatkan berbagai OPD yang bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk mengidentifikasi MBR yang berpotensi terlibat dalam kegiatan padat karya sesuai

yang tercantum dalam Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/300/436.1.2/2024 Tahun 2024 Tentang Tim Program Padat Karya Pemerintah Kota Surabaya. Para peserta diberikan pelatihan dan pendampingan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan, serta evaluasi berkala untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program (Surabaya.go.id, 2023).

Program Padat Karya juga diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Program Padat Karya di Kota Surabaya yang menjelaskan bahwa Padat Karya sebagai kegiatan produktif untuk memberdayakan masyarakat, khususnya Keluarga Miskin, dengan memanfaatkan sumber daya alam (SDA), tenaga kerja, dan teknologi lokal, guna menekan pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan pendapatan, serta menjaga daya beli masyarakat. Salah satu tujuan yang tercantum dalam perwali tersebut ialah meningkatkan akses Keluarga Miskin terhadap layanan dasar melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Sejak diluncurkan pada akhir tahun 2021, program Padat Karya telah memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian Surabaya. Data BPS menunjukkan penurunan TPT dari 9,79% pada tahun 2020 menjadi 4,91% pada tahun 2024 (Elaine, 2024). Selain itu, angka kemiskinan juga mengalami penurunan signifikan berkat program Padat Karya. Dengan upaya berkelanjutan, program Padat Karya diharapkan terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Surabaya dan mengurangi angka pengangguran serta kemiskinan (Dinas Kominfo Jawa Timur, 2024).

Salah satu sasaran utama dalam periode pembangunan kontemporer adalah mewujudkan efisiensi dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia (Harahap et al., 2023). Era globalisasi saat ini ditandai dengan pembangunan infrastruktur, terutama inisiatif Padat Karya yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, Nugroho (2022) menyampaikan bahwa masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui pelaksanaan pembangunan yang terencana dalam bentuk transparansi. Menurut Windiasih (2019), pembangunan infrastruktur di suatu wilayah bertujuan untuk merencanakan program desa dalam jangka waktu tertentu dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif, serta disesuaikan dengan kebutuhan desa.

Pemerintah menetapkan kebijakan upah program Padat Karya pada tahun 2017 dalam usaha untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat yang terdampak oleh program padat karya. Untuk mencapai tujuan tersebut, empat menteri yaitu, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terkepong, dan Transmigrasi (PDTT) menerbitkan keputusan sinkronisasi dan penguatan secara bersamaan. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa desa harus mematuhi peraturan yang berlaku (Aqila et al., 2022).

Dalam praktiknya, program Padat Karya di Kota Surabaya adalah contoh nyata bagaimana pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dengan strategi yang tepat, program ini tidak hanya membantu ekonomi warga dalam jangka pendek tetapi

juga meningkatkan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang. Jika diterapkan di kota-kota lain dengan penyesuaian terhadap kondisi lokal, program ini berpotensi menjadi solusi sistemik dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia (Surabaya.go.id, 2022b).

Pemkot Surabaya secara aktif memaksimalkan program Padat Karya sebagai strategi dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran dengan membentuk tim yang terdiri dari OPD yang bertugas untuk mengelola serta memantau pelaksanaan program ini secara menyeluruh. Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/300/436.1.2/2024 tentang Tim Program Padat Karya mendukung langkah tersebut. Program Padat Karya memiliki dua skema utama dalam pelaksanaannya. Skema pertama melibatkan proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Skema kedua berhubungan dengan pengembangan dan pengelolaan usaha mikro, yang bertujuan untuk membantu keluarga kurang mampu agar dapat memperoleh manfaat dari program tersebut (Gapura.surabaya.go.id, 2024).

Dalam penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan pemberdayaan dan pengelolaan usaha mikro. Pemberdayaan masyarakat dapat terwujud melalui keterlibatan aktif masyarakat yang didukung oleh pihak-pihak yang berperan dalam proses pemberdayaan. Fokus utama pemberdayaan ini adalah kelompok yang kurang berdaya, tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sumber daya produktif, atau masyarakat yang tersisihkan dalam pembangunan. Hasil akhir yang diharapkan dari pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya kemandirian

warga agar mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal (Laurens, 2021).

Gambar 1.1. Penyebaran Program Padat Karya di Kota Surabaya



Sumber: Barometerjatim.com (2022)

Berdasarkan gambar yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa program Padat Karya di Kota Surabaya telah di 31 Kecamatan, dimana salah satunya adalah Kecamatan Bubutan 23.193 jiwa/km². Jumlah tersebut menjadi Bubutan sebagai kecamatan terpadat keempat di Kota Surabaya pada tahun 2023. Selain itu Kecamatan Bubutan merupakan satu-satunya kecamatan di Kota Surabaya yang memiliki jenis usaha berupa kampung batik.

Melansir website resmi Surabaya.go.id (2022a) bahwa Pemkot Surabaya secara resmi membuka Kampung Batik Tin Gundih yang berlokasi di Jalan Sumber Mulyo IV, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan Kota Surabaya pada

tanggal 24 Juni 2022. Kampung batik ini bermula dari program cangkrukan yang dilakukan pada tahun 2021 dengan camat dan lurah, dimana camat dan lurah diminta untuk dapat mengaktifkan potensi di setiap wilayah yang mereka pimpin. Kampung Batik Tin Gundih berhasil dibentuk berkat kerja sama antara camat, lurah, dan masyarakat setempat, yang kemudian mampu mendorong perekonomian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui pengembangan usaha batik. Pada awal pembentukannya, kampung batik ini melibatkan 25 warga dalam proses produksi Batik Tin Gundih, terdiri atas 16 warga MBR dan 9 warga non-MBR. Hal ini disampaikan oleh Walikota Surabaya, Eri Cahyadi sebagai berikut:

“Jadi kalau kita mau tanya, sebenarnya kampung ini konsepnya siapa? Ini adalah konsep kebersamaan, konsep yang dari gotong-royong pertemuan musyawarah mufakat tadi, sehingga muncullah kampung ini. Jadi diawali sekitar November kami cangkrukan, lalu dilakukan penanaman Pohon Tin atau Ara bersama warga dan komunitas. Kemudian dijadikan maskot untuk Batik Tin. Makanya kita kasih brandnya Kampung Batik Tin Gundih. Ini kolaborasi dan gotong royong yang sangat luar biasa. Saya yakin, kalau semua kampung seperti ini, maka Surabaya quantum lompatannya akan sangat bagus ketika menyelesaikan kemiskinan di Surabaya.” (<https://surabaya.go.id/id/berita/67631/gundih-surabaya-diresmikan-sebagai-kampung-ceria-dan-batik-tin> diakses pada 19 Maret 2025)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada 10 Maret 2025, ditemukan bahwa meskipun terletak di daerah yang mayoritas penduduknya merupakan pelaku usaha kecil seperti pedagang kaki lima (PKL) dan pengelola industri rumahan, Batik Tin berhasil menarik perhatian dengan produk batik tulis dan layanan edukasi yang ditawarkannya. UMKM Batik Tin termasuk dalam kategori usaha rumah padat karya (RPK) yang dipantau oleh Pemerintah Kota Surabaya, yang dimulai pada masa pandemi Covid-19 untuk mengatasi kejenuhan

warga dengan memberikan keterampilan kepada mereka. Saat ini, meskipun jumlah partisipannya menurun, Batik Tin tetap aktif memproduksi dan memasarkan batiknya melalui berbagai platform seperti *e-commerce* dan toko fisik.

Selain itu, melansir website Surabayatoday.id (2022) diketahui bahwa RPK Kampung Batik Tin juga telah menjadi tempat belajar batik bagi mahasiswa asing yang berasal dari Bangladesh, Pakistan, Myanmar, Thailand, Filipina, Singapura, dan juga Malaysia. Sebelum kedatangan mahasiswa asing tersebut, sudah ada mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia yang terlebih dahulu belajar di kampung ini. Mereka berasal dari Maluku, Irian Barat, NTT, NTB, dan Kalimantan. Dalam proses belajar membatik, mereka merasakan pengalaman langsung dalam membatik, terutama Batik Tin yang menjadi ciri khas kampung ini. Di sela-sela kegiatan membatik, mereka juga memberikan apresiasi dan berharap agar Batik Tin dapat terus berkembang hingga ke mancanegara. Hal ini diungkapkan oleh koordinator perajin yang juga menjabat sebagai Ketua RW 4, Siswojo, sebagai berikut:

“Saat itu ada 15 mahasiswa asing yang belajar di tempat kami. Mereka berasal dari Bangladesh, Pakistan, Myanmar, Thailand, Filipina, Singapura, dan juga Malaysia. Mereka sangat enjoy di tempat kami mulai dari siang hingga malam. Alhamdulillah mereka mengganti kain dan pewarna kami, dan alhamdulillah itu menjadi pemasukan tersendiri bagi para perajin. Kalau yang dari mahasiswa nusantara ada 20 mahasiswa. Mereka belajar membatik juga. Jadi, di tempat kami sudah sering jadi jujukan belajar membatik. Terimakasih banyak Pak Eri dan jajaran pemkot yang telah memperhatikan kami dan membantu kami untuk terus berkembang.”)
<https://www.surabayatoday.id/2022/11/17/wisatawan-mancanegera-dan-mahasiswa-asing-belajar-membatik-di-sejumlah-padat-karya-surabaya/>
(diakses pada 10 Maret 2025)

Namun demikian, berdasarkan studi yang dilakukan Dewi et al., (2024) menunjukkan bahwa UMKM Batik Tin Gundih mengalami beberapa masalah dari berbagai aspek permasalahan dari berbagai aspek, seperti SDM, operasional, pemasaran, dan keuangan. Dalam aspek SDM, Batik Tin belum memiliki paparan visi dan misi bisnis, terdapat masalah seperti pembagian tugas yang tidak terstruktur, ketiadaan indikator kinerja yang jelas, aturan kerja yang kurang mengikat, serta sistem penggajian yang tidak stabil. Dari segi operasional atau produksi, meliputi kesulitan dalam proses pewarnaan batik untuk mencapai warna yang diinginkan, tingginya tingkat cacat produk, dan rendahnya produktivitas karena pengrajin tidak selalu aktif selama jam operasional. Dalam pemasaran, terdapat kendala seperti terbatasnya administrasi media sosial, ketergantungan pada promosi dari mulut ke mulut oleh Dinas Kota Surabaya, serta kesulitan dalam mempertahankan pelanggan. Dari aspek keuangan, meskipun Batik Tin telah mulai menggunakan pencatatan digital sederhana, pencatatan secara manual dengan nota kertas masih tetap dilakukan. Secara keseluruhan, berbagai permasalahan ini menghambat produksi dan keberlanjutan UMKM Batik Tin Gundih.

Penelitian terkait dengan program padat karya ini telah banyak dilakukan diantaranya oleh Mahendra & Rahaju (2024), dengan temuan bahwa Pelaksanaan program Padat Karya di Kecamatan Krembangan telah diimplementasikan dengan sumber daya fasilitas yang mendukung dan dukungan dari para *stakeholder*. Akan tetapi, implementasi program berada pada usaha belum optimalnya produktivitas dari usaha budidaya maggot yang dilakukan. Kemudian penelitian Rouf et al.,

(2024), mengindikasikan berkurangnya pengangguran secara signifikan di daerah yang menerapkan program tersebut, serta memberikan efek positif bagi perekonomian setempat. Namun demikian, kesuksesan program Padat Karya ditentukan oleh perencanaan yang matang, pengendalian yang ketat, serta dedikasi tinggi dari seluruh pihak yang terlibat.

Sementara itu, penelitian Lafina et al., (2023) mengindikasikan bahwa pelaksanaan program Padat Karya masih belum optimal. Dari segi pengawasan, pengembangan sumber daya, khususnya tenaga MBR, serta regulasi yang mengatur pedoman teknis dalam *Collaborative Governance*, terdapat sejumlah kriteria yang menjadi indikator kegagalan. Berbeda halnya dengan penelitian Riza & Ginting (2024), bahwa program rumah padat karya memberikan pengaruh besar dalam menekan angka pengangguran di Surabaya. Melalui inisiatif ini, pemerintah berhasil membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang sebelumnya tidak bekerja, sehingga turut berkontribusi dalam meningkatkan taraf kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan di Kota Surabaya..

Penelitian sebelumnya dalam domain program padat karya telah mengungkapkan inkonsistensi hasil penelitian (*research gap*) terutama dalam konteks implementasi kebijakan program. Tinjauan literatur penelitian ini menunjukkan bahwa hanya ada sedikit penelitian yang meneliti pemberdayaan ekonomi secara mendalam. Maka dari itu, untuk mengisi kesenjangan dalam literatur, penelitian ini berfokus pada pemberdayaan pada pengrajin batik pada dalam konteks mengambil studi di sekolah inklusi yang telah berhasil menjadi destinasi wisata edukasi dalam belajar membatik. Kebutuhan untuk mendapatkan

model pemberdayaan yang dilakukan Pemkot dapat dikatakan mendesak dan penting, karena pemberdayaan memiliki peranan dalam melakukan sebuah aktivitas, terutama program padat karya di Kampung Batik Tin Gundi. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada analisis pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program padat karya.

Urgensi penelitian ini menggunakan kajian teori proses pemberdayaan menurut Wilson yang dikutip oleh Hady et al., (2021) bahwa dalam pemberdayaan mengacu pada aspek utama yakni *awakening*, *understanding*, *harnessing*, dan *using*. Pertama, *awakening* yaitu membantu organisasi dalam mengevaluasi kapasitas, sikap, serta keterampilan yang dimiliki, sekaligus merancang harapan untuk kondisi yang lebih baik. Kedua, *understanding* yakni mendapatkan wawasan serta sudut pandang yang telah didapatkan terkait individu pada lingkungan pekerjaan dan keadaan umum. Ketiga, *harnessing* dimana individu yang telah menunjukkan keahlian dan karakter tertentu perlu menentukan cara menggunakannya untuk meningkatkan pemberdayaan. Keempat, *using* yaitu penggunaan keterampilan dan kemampuan setiap hari sebagai bagian dari kehidupan kerja.

Menurut Awaru et al., (2021), proses pemberdayaan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan mereka, sehingga tidak hanya dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar, tetapi juga dapat membuktikan bahwa meskipun memiliki perbedaan fisik dibandingkan individu lainnya, mereka tetap mampu berkontribusi dan berperan aktif dalam kehidupan sosial. Proses pemberdayaan dengan menggunakan empat aspek tersebut dikarenakan agar pekerjaan yang telah

dilaksanakan berdasarkan situasi, potensi, serta kebutuhan masyarakat, sehingga para peserta merasa diberikan kepercayaan sehingga akan muncul rasa tanggung jawab untuk dapat merealisasikan tanggung jawab pekerjaannya dengan sungguh-sungguh.

Dengan demikian, berdasarkan data, fakta dan akibat dari fenomena penelitian di atas tersebut, maka persoalan program padat karya ini memiliki keterkaitan erat dengan temuan penelitian Hatu & Rauf (2018), yang mengungkapkan bahwa pemberdayaan adalah suatu pola yang kompleks secara struktural dan multidimensi. Secara umum, masyarakat penyandang disabilitas berada dalam kondisi rentan, tidak berdaya, terisolasi, serta kesulitan dalam menyampaikan aspirasi. Situasi ini terjadi dalam konteks tingginya tingkat pengangguran di Kelurahan Gundih, yang pada akhirnya menghambat mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupan yang layak.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, hal ini mendorong peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Pada Kampung Batik Tin Gundih Kota Surabaya”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang, diperlukan penelitian dengan merumuskan masalah sebagai berikut **“Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya pada Kampung Batik Tin Gundih Kota Surabaya?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya pada Kampung Batik Tin Gundih Kota Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Meningkatkan pemahaman serta memperluas wawasan secara konkret, khususnya dalam kajian pemberdayaan ekonomi, dengan fokus pada penanganan pengangguran melalui program padat karya, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini berkontribusi dalam menambah literatur dan referensi bagi Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, khususnya dalam kajian pemberdayaan ekonomi melalui program Padat Karya. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi studi sejenis di masa mendatang.

3. Bagi Pemerintah Kota Surabaya dan *Stakeholder* Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan gambaran kepada Pemerintah Kota Surabaya, khususnya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya yang berperan dalam memberikan pelatihan bagi calon

penerima intervensi program. Sementara itu, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPRKPP) bertanggung jawab dalam pembangunan Rumah Padat Karya, sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berperan dalam memfasilitasi legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Pemerintahan Kelurahan Gundih selaku pelaksana program untuk meninjau dan menindaklanjuti bahkan terus mengembangkan program padat karya dalam mengurangi angka pengangguran di Kota Surabaya.